

STRATEGI GURU PPKn DALAM PENGELOLAAN KELAS INKLUSIF DI SMA NEGERI 1 GEDANGAN

Siti Fatimah

12040254037 (S1 PPKn, FISH, UNESA) missmemey09@gmail.com

Totok Suyanto

0004046307 (PPKn, FISH, UNESA) totoksuyantounesa@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan strategi guru PPKn dalam pengelolaan kelas inklusif di SMA Negeri 1 Gedangan. Pengelolaan kelas merupakan suatu usaha yang dilakukan guru untuk menciptakan atau mempertahankan kondisi kelas yang optimal sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teori behaviorisme B.F Skinner. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengelola kelas inklusif ada enam kegiatan yang harus diperhatikan oleh guru PPKn, antara lain (1) penentuan tata tertib/peraturan kelas, (2) pengaturan penempatan dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berinteraksi, (3) pengelolaan lingkungan belajar, (4) penyediaan media belajar, (5) pengaturan tempat duduk, (6) mengakomodasi kebutuhan belajar.

Kata kunci : strategi, pengelolaan kelas, dan kelas inklusif

Abstract

The objective of research is to describe strategy of civic education teacher in management of inclusive classroom at SMA Negeri 1 Gedangan. Classroom management is one of effort which has done by teacher to create or maintain also make class optimalize there fore, it can reach the learning purpose. This research use qualitative approaches and B.F Skinner behaviorisme to theory. To collect data use thecnique by observation, interview and documentation. The research outcome shows in the interest of managing inclusive class. There are six activities which must be concerned by the Citizenship teacher are (1) using class roles, (2) setting the student placement by giving every student chance to interaction, (3) managing learning environment, (4) using the learning media, (5) setting the students seat, (6) Accomodate learning necessity

Keyword: strategy, classroom management, and inclusive class

PENDAHULUAN

Hak untuk mendapat pendidikan telah diakui baik dalam skala nasional maupun internasional. Pendidikan tidak terbatas pada anak-anak yang normal, mereka yang berkebutuhan khusus juga mendapat hak yang sama. Pengakuan yuridis secara internasional tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak pasal 23 ayat (3) tahun 1989 yang menyatakan bahwa masyarakat dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat jika anak-anak berkebutuhan khusus harus mendapat pendidikan yang layak serta perhatian dan penjaminan yang jelas dari masyarakat pada umumnya dan dari Negara pada khususnya (UNICEF, 1989).

Hak memperoleh pendidikan juga diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pasal 31 ayat (1) yang menyatakan “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Kemudian dijelaskan lebih lanjut melalui Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bagian ke satu pasal 5 ayat (2) yang menyatakan “warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional,

mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus” (DPR-RI, 2003). Hal ini jelas berkaitan langsung dengan hak-hak yang mereka miliki bahwa pendidikan khusus mampu mendukung proses belajar mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Dijelaskan dalam UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 32 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa:

“Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”.

Hal ini berkaitan dengan pendidikan khusus bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak tanpa melihat keterbatasan yang dialami dan berhak mencapai cita-citanya.

Pendidikan khusus sering kali menjadi golongan minoritas di Indonesia. Mereka baik secara sengaja maupun tidak menjadi kelompok-kelompok tertentu yang akhirnya mengarah pada diskriminasi pendidikan. Menghadapi permasalahan ini dirumuskanlah sistem

penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua siswa yang memiliki kelainan-kelainan tertentu untuk mengikuti pembelajaran dalam satu lingkungan yang sama dan bersama-sama dengan siswa pada umumnya yang disebut sistem pendidikan inklusif (Depdiknas, 2009).

Permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif salah satunya yaitu masalah tenaga pendidik. Menurut Kustawan (2012: 74) setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif seyogyanya mempunyai pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang disyaratkan. Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai di sekolah penyelenggaraan inklusif merupakan kebutuhan krusial dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah Kabupaten atau Kota memegang peran penting dalam upaya menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Guru di sekolah inklusif di samping menguasai empat kompetensi umum di sekolah reguler yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial, juga harus menguasai kompetensi dasar untuk membelajarkan anak berkebutuhan khusus (ABK). Untuk itu, guru harus mempunyai motivasi kerja yang tinggi yaitu sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja (Mudjito, 2012: 31). Akan tetapi kebanyakan tenaga pendidik di sekolah inklusif dari kalangan guru reguler masih ada yang belum tahu mengenai kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Kemampuan guru bidang studi pada umumnya hanya sebatas di bidang umum saja sehingga diasumsikan bahwa guru bidang studi mengalami kesulitan dalam menerapkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Secara umum dan syarat keilmuan pengetahuan guru reguler belum memperoleh ilmu pengetahuan serta mengenal wawasan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah reguler, hal ini disebabkan karena pada saat mereka kuliah belum mendapatkan materi kependidikan luar biasa yang menunjang dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Mereka juga hanya sedikit mengetahui informasi mengenai pendidikan inklusif melalui *workshop*, seminar dan pelatihan-pelatihan. Sehingga mereka memerlukan pembinaan untuk mengembangkan keahliannya dalam bidang umum maupun khusus yang berhubungan dengan pendidikan inklusif.

Salah satu kesulitan yang dialami guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar adalah pengelolaan kelas. Hal ini disebabkan kondisi kelas inklusif yang heterogen dibandingkan kelas reguler. Kelas inklusif mempunyai bermacam-macam

karakteristik peserta didik, mulai dari anak reguler atau anak normal hingga anak yang memiliki ketunaan atau anak berkebutuhan khusus. Guru memegang peranan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas belajar peserta didik. Selain itu guru juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar seluruh peserta didik dapat dan ingin belajar serta merasa terlibat di kelas dan di sekolah.

Permasalahan ini juga terjadi di beberapa sekolah yang mengadakan pendidikan inklusif, salah satunya adalah sekolah inklusif yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang menaruh perhatian besar terhadap layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), terutama pendidikan inklusif. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan kebutuhan akan adanya layanan pendidikan khusus yang bermutu dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Sejak disahkannya Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pendidikan segera mengambil langkah nyata guna melaksanakan apa yang telah diamanatkan Permendiknas tersebut. Salah satunya adalah dengan menunjuk beberapa sekolah menjadi sekolah *piloting* inklusif atau sekolah yang dijadikan uji coba untuk mengadakan pendidikan inklusif. Ada tiga sekolah yang ditunjuk oleh dinas pendidikan yakni SMP Negeri 4 Sidoarjo, SMA Negeri 1 Gedangan, dan SDN Lemahputro 1 Sidoarjo (Sulistiyadi, 2014: 3)

SMA Negeri 1 Gedangan merupakan salah satu sekolah pertama yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Sidoarjo untuk menjalankan program inklusif. Program ini sudah dijalankan mulai dari tahun 2011 dan sekarang sudah meluluskan anak berkebutuhan khusus atau sudah ada alumni. Program pendidikan inklusif yang dijalankan di SMA Negeri 1 Gedangan merupakan penunjukan dari Dinas Pendidikan Sidoarjo. Penunjukan yang dilakukan sepihak membuat sekolah sempat dilanda kebingungan karena tidak adanya persiapan dalam menjalankan program pendidikan inklusif.

Pelaksanaan pembelajaran di kelas inklusif menempatkan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak reguler di kelas yang sama. Sekolah menggunakan sistem kelas reguler penuh, dimana anak-anak berkebutuhan khusus akan mengikuti pelajaran sepenuhnya di ruang kelas reguler secara penuh bersama dengan anak-anak reguler. Hal ini dilakukan agar anak berkebutuhan khusus dapat beradaptasi dengan baik dengan anak-anak yang reguler. Hal ini berlaku pada semua mata pelajaran, termasuk mata pelajaran PPKn. Dalam pembelajaran PPKn anak berkebutuhan khusus

mengikuti proses pembelajaran secara penuh layaknya siswa reguler.

Guru PPKn jarang sekali mendapatkan pendampingan dari guru pendamping khusus ketika melaksanakan pembelajaran PPKn di kelas inklusif. Padahal dalam sistematikanya setiap proses belajar mengajar, guru mata pelajaran harus mendapatkan pendampingan oleh guru pendamping khusus. Sebagai guru yang profesional, guru dituntut untuk bisa ditempatkan di situasi apapun termasuk di kelas inklusif. Keberadaan anak berkebutuhan khusus di kelas membuat guru harus bisa mengelola kelas dengan baik agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Berdasarkan dari pemikiran tersebut, penelitian dalam rangka mengetahui strategi guru PPKn dalam mengelola kelas inklusif merupakan hal penting. Hal tersebut dapat berguna untuk mengetahui bagaimana strategi guru PPKn dalam mengelola kelas inklusif di SMA Negeri 1 Gedangan.

Berdasarkan Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 telah dijelaskan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Berdasarkan pernyataan tersebut maka setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus menerapkan kebijakan dan prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan pendidikan inklusif sesuai dengan Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 sehingga anak berkebutuhan khusus bisa terlayani sesuai dengan kebutuhan masing-masing melalui peran dari guru reguler, guru pendamping khusus maupun kepala sekolah.

Menurut Mudjito, dkk (2012: 25) Anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Peserta didik yang termasuk anak berkebutuhan khusus adalah tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat dan juga anak dengan gangguan kesehatan. Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan pembelajaran yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Hal ini harus diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran di kelas inklusif agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan nyaman dan aman.

Kondisi kelas inklusif yang memiliki peserta didik dengan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda membuat guru harus bisa mengelola kelas inklusif dengan baik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang optimal ketika pembelajaran dilaksanakan. Menurut

Yamin (2013:1) strategi adalah rencana atau tindakan yang penting yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi dalam sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan pengertian pengelolaan kelas menurut Rohani (2004 : 123) adalah kegiatan-kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar (pembinaan "raport", penghentian tingkah laku peserta didik yang menyelewengkan perhatian kelas, pemberian ganjaran bagi ketepatan waktu penyelesaian tugas oleh penetapan norma kelompok yang produktif dan sebagainya).

Guru PPKn dalam mengelola kelas inklusif memerhatikan beberapa hal yaitu penentuan tata tertib/peraturan kelas yang tidak diskriminatif, pengaturan penempatan dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berinteraksi dengan peserta didik pada umumnya dan yang mampu memberi pengaruh positif (tutor sebaya), pengelolaan lingkungan belajar, dengan mengupayakan suasana yang tenang serta mengurangi stimulasi gangguan (visual : pengaturan pencahayaan yang optimal bagi peserta didik terutama *low vision*, dan auditori : ruang yang kedap suara bagi peserta didik tunarungu), penyediaan media belajar yang menstimulasi kerja sama dan bukan kompetitif, yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, pengaturan tempat duduk peserta berkebutuhan khusus yang memerhatikan kebutuhan khusus peserta didik dan mengembangkan potensinya dengan optimal. Misalnya peserta didik tunarungu duduk bebaris didepan agar mudah membaca keterarah-wajahan (komunikasi total)

Penelitian ini menggunakan teori behaviorisme dari B.F. Skinner yang berpandangan bahwa belajar terjadi melalui *operant conditioning* atau pembiasaan perilaku respons (Hadis, 2008 : 67). *Operant* adalah sejumlah perilaku atau respon yang membawa efek yang sama terhadap lingkungan yang dekat. Respon dalam *operant conditioning* terjadi tanpa didahului oleh stimulus, melainkan oleh efek yang ditimbulkan oleh *reinforcement*. *Reinforcement* adalah penguatan yang diberikan kepada peserta didik. *Reinforcement* terdiri atas dua macam yaitu penguatan positif dan penguatan negatif.

Penguatan positif dan penguatan negatif dapat meningkatkan respon dari peserta didik. Penguatan positif adalah stimulus yang apabila ditambahkan dalam suatu situasi akan memperkuat individu dalam memberikan respon. Sedangkan penguatan negatif adalah suatu stimulus yang bila dipindahkan dari suatu situasi dapat memperkuat kemungkinan terjadinya respon. Menurut Skinner dalam Suryabrata (1998: 272-273) prosedur pembentukan tingkah laku dalam *operant conditioning* itu adalah dilakukan identifikasi mengenai

reinforcement bagi tingkah laku yang akan dibentuk, dilakukan analisis untuk mengidentifikasi komponen-komponen kecil yang membentuk tingkah laku yang dimaksud, menggunakan komponen-komponen tersebut dengan urut dan mengidentifikasi *reinforcement* untuk setiap komponen, melakukan pembentukan tingkah laku, dengan menggunakan urutan komponen yang telah disusun. Kalau komponen yang pertama sudah dilakukan maka hadiah yang pertama diberikan, kalau tingkah laku sudah terbentuk maka akan dilakukan komponen yang kedua, ketiga, dan selanjutnya, sampai tingkah laku yang diharapkan terbentuk.

Skinner juga mengungkapkan bahwa dalam *operant conditioning* juga ada *punishment* atau hukuman. Menurut Skinner hukuman tidak menurunkan probabilitas respon, walaupun hukuman bisa menekan respon selama hukuman itu diterapkan, namun hukuman itu tidak akan melemahkan kebiasaan. Hukuman hanya menekan perilaku, ketika ancaman dihilangkan maka perilaku akan kembali seperti semula. Dalam penelitian ini relevan dengan teori *behaviorisme*. Dalam pengelolaan kelas guru menggunakan strategi untuk menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman, salah satunya ialah dengan membiasakan perilaku siswa untuk selalu disiplin, menghargai perbedaan diantara teman, aktif dalam pembelajaran, dan lain sebagainya. Selain itu guru juga menggunakan hukuman untuk menindaklanjuti perilaku negatif yang dilakukan siswa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian pada kondisi objek alamiah (*naturalistik*). Objek yang alamiah adalah objek yang apa adanya, tidak memanipulasi sehingga kondisi pada saat memasuki objek, setelah berada di objek dan setelah keluar dari objek relatif tidak berubah. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan suatu data yang mengandung makna. Selain itu penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. (Sugiyono 2010 : 1-2)

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Mendiskripsikan data kualitatif adalah dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada, sehingga memberikan gambaran nyata terhadap responden. Metode penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika sistematis, prinsip angka, atau metode statistik. (Mulyana 2002:150). Penggunaan metode deskriptif kualitatif disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian yaitu mendeskripsikan strategi guru PPKn dalam pengelolaan kelas inklusif di SMA Negeri 1 Gedangan.

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah SMA Negeri 1 Gedangan tepatnya di Jalan Raya Sedati Km. 2 Gedangan, Kecamatan Sidoarjo. Sedangkan Alokasi waktu penyusunan penulisan skripsi dari tahap awal sampai pelaporan dilakukan selama 11 bulan, tepatnya mulai dari September 2015 sampai Juli 2016.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Pertimbangan pengambilan informan didasarkan atas pengetahuan informan mengenai strategi guru PPKn dalam mengelola kelas inklusif di SMA Negeri 1 Gedangan. Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan informan diantaranya yaitu (1) Mengetahui pengelolaan kelas inklusif pada saat pembelajaran PPKn, (2) Terlibat dalam proses pembelajaran PPKn di kelas Inklusif XI IPS 2, XI IPS 3, dan XI IPS 4.

Dari kriteria di atas didapatkan enam informan dalam penelitian ini yaitu (1) Dra. Fety Susilawatie, M.Pd selaku guru PPKn kelas XI IPS 3 dan XI IPS 4, (2) Dra. Aini Mandriana selaku guru PPKn kelas XI IPS 2, (3) Muhammad Mujiono, S.Pd selaku koordinator inklusif, (4) M. Hasyim Muzakki selaku peserta didik XI IPS 3, (5) Della Aida Lema selaku peserta didik XI IPS 4, (6) Albagista Intan Ramzana selaku peserta didik XI IPS 2.

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana cara guru PPKn dalam mengelola kelas inklusif di SMA Negeri 1 Gedangan. Dalam hal ini strategi diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan guru untuk menciptakan atau mempertahankan kondisi kelas yang kondusif. Strategi yang dilakukan guru didasarkan pada enam aspek dalam pengelolaan kelas inklusif yaitu (1) penentuan tata tertib, (2) pengaturan penempatan peserta didik untuk berinteraksi, (3) pengelolaan lingkungan belajar, (4) penyediaan media belajar, (5) pengaturan tempat duduk, (6) mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk menggali informasi kepada informan yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu strategi guru PPKn dalam mengelola kelas inklusif di SMAN 1 Gedangan. Sedangkan observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif, dimana peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati tetapi tidak ikut dalam kegiatan tersebut. Dalam penelitian ini akan dilakukan pengamatan kepada guru PPKn dalam mengelola kelas inklusif yang nantinya akan dipadukan dengan hasil wawancara. Dalam penelitian ini juga menggunakan dokumentasi sebagai pelengkap dari wawancara dan dokumentasi.

Uji keabsahan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data dan triangulasi teknik. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Milles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010 : 91) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Guru PPKn memiliki strategi dalam pengelolaan kelas inklusif di SMA Negeri 1 Gedangan. Untuk menjawab permasalahan yang ada maka diperlukan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil observasi yang dilakukan di SMA Negeri 1 Gedangan pada bulan April sampai Mei 2016 diperoleh informasi bahwa di SMA Negeri 1 Gedangan masih terjadi beberapa masalah dalam proses pembelajaran PPKn seperti *bullying*, perilaku ABK yang tidak stabil, dan lain sebagainya. Permasalahan yang terjadi membuat suasana di kelas menjadi kurang nyaman. Oleh karena itu guru PPKn harus memiliki strategi dalam pengelolaan kelas agar kelas menjadi nyaman dan tujuan pembelajaran dapat tercapai, terlebih lagi dalam pembelajaran di kelas inklusif guru PPKn tidak didampingi oleh guru pendamping khusus.

Ketika mengelola kelas inklusif ada enam hal yang harus diperhatikan oleh guru PPKn yaitu penentuan tata tertib, pengaturan penempatan dengan memberikan kesempatan peserta didik untuk berinteraksi, pengelolaan lingkungan belajar, penyediaan media belajar, pengaturan tempat duduk, dan mengakomodasi kebutuhan belajar sesuai kebutuhan khusus peserta didik.

Penentuan tata tertib bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang ada di kelas guna menciptakan kondisi kelas yang nyaman dan aman. Pada dasarnya tata tertib yang digunakan di kelas inklusif sama dengan tata tertib di kelas reguler. Dalam penentuan tata tertib di kelas inklusif, guru PPKn menggunakan beberapa strategi agar tata tertib tersebut dapat dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh anggota di dalam kelas inklusif. Cara yang pertama yakni dengan memperlakukan peserta didik secara adil. Hal tersebut dapat diketahui melalui hasil observasi partisipan yang dilakukan, yakni observasi pada tanggal 22 April 2016 di kelas XI IPS 3.

Pada kegiatan observasi diketahui bahwa penentuan tata tertib di kelas inklusif tidak ada bedanya dengan penentuan tata tertib di kelas reguler. Ibu Fety menggunakan tata tertib seperti kelas-kelas yang lainnya. Ibu Fety juga memberikan hukuman yang sama kepada

peserta didik, hanya saja untuk ABK ibu Fety lebih memperhalus cara berkomunikasi dalam menyampaikan tata tertib. Dalam observasi di temui beberapa peserta didik yang menyalahgunakan gadget, hal ini tidak hanya dilakukan oleh peserta didik reguler, tetapi juga peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam menanganinya ibu Fety memberikan tegoran kepada peserta didik. untuk peserta didik reguler ibu Fety menegor "*hapene tak pek lo lek gak dimasukno*". Sedangkan untuk peserta didik berkebutuhan khusus ibu Fety mendekatinya dan berkomunikasi secara pelan-pelan atau halus.

Hal serupa juga diterapkan ibu Fety di kelas inklusif yang lain yakni di XI IPS 4. Pada observasi tanggal 4 Mei 2016 diketahui bahwa ibu Fety juga menggunakan tata tertib yang sama di kelas XI IPS 4. Dalam menindak lanjuti suatu pelanggaran, ibu Fety cenderung menggunakan cara halus dengan memberikan penguatan terhadap peserta didik. Kondisi di kelas XI IPS 4 cenderung tidak kondusif ketika pembelajaran PPKn, hal ini dikarenakan peserta didik usai melakukan olahraga. Peserta didik cenderung mengantuk dan juga ramai ketika pembelajaran PPKn berlangsung, selain itu ada beberapa peserta didik yang menyalahgunakan penggunaan *gadget* di kelas.

Cara yang digunakan oleh ibu Fety sama halnya dengan cara yang digunakan oleh ibu Aini, yakni ketika observasi tanggal 27 April 2016 menunjukkan bahwa di kelas XI IPS 2 ibu Aini menggunakan tata tertib yang sama dengan kelas reguler. Dimana ibu Aini lebih menggunakan cara halus untuk mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di kelas inklusif, yakni dengan cara pemberian penguatan. Pelaksanaan pembelajaran PPKn di laksanakan pada jam-jam terakhir sekolah membuat peserta didik cenderung bosan dan mengantuk dalam mengikuti pembelajaran, alhasil banyak siswa yang tertidur dan juga tidak memperhatikan guru. Dalam menghadapi permasalahan ini, ibu Aini hanya memberikan teguran dan nasihat kepada peserta didik

Permasalahan lain yang terjadi di XI IPS 2 yakni kurangnya kesadaran peserta didik akan keberadaan ABK, sehingga terjadi pengucilan terhadap ABK dan juga *pembullying*. Dalam menyikapi permasalahan ini ibu Aini memberikan penguatan terhadap peserta didik agar mau menerima ABK dan juga mau berbagi dengan ABK. Ibu Aini tiak segan-segan menegor siapa saja yang sekiranya *membullying* ABK, ibu Aini bertindak adil bagi siapa saja yang melanggar tata tertib.

Berdasarkan observasi tersebut diketahui bahwa dalam penentuan tata tertib di kelas inklusif, guru menggunakan tata tertib yang sama dengan tata tertib yang ada di kelas inklusif. Dalam pengimplementasiannya guru cenderung menggunakan

penguatan dibandingkan hukuman. Guru memberikan penguatan kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran di kelas. Guru PPKn juga memperlakukan dengan adil peserta didik yang melanggar tata tertib, baik ABK maupun reguler. Hanya saja dalam penyampaian kepada ABK, guru menggunakan bahasa yang lebih halus dan juga menggunakan kata-kata yang tidak memancing emosi ABK. Cara guru dalam penentuan tata tertib di kelas inklusif diperkuat dengan pernyataan dari guru PPKn ibu Fety selaku guru kelas XI IPS 3 dan XI IPS 4 yaitu:

“Tata tertibnya ya sama sih mbak dengan kelas-kelas lain, hanya saja untuk ABK sendiri ya tidak terlalu tegas, tidak seperti anak-anak reguler, paling ya kita ajak ngobrol baik-baik itu ABK, biar dia juga tidak terganggu mentalnya. Artinya kita menganggap mereka itu sama saja, siapa yang melanggar ya kita tindak.” (Wawancara, 13 Mei 2016)

Sedangkan menurut ibu Aini selaku guru PPKn kelas XI IPS 2 yaitu:

“Kalau tata tertibnya sih sama seperti pada umumnya, hanya khusus anak inklusif itu ada suatu toleransi-toleransi tertentu untuk tidak terlalu tegas untuk memberikan tindakan-tindakan kepada mereka karena mereka kan punya suatu kekurangan. Tapi secara umum ya sama. Kita perlakukan sama, yang melanggar ya harus dapat tindakan. Tidak peduli dia anak pejabat atau bagaimana. Meskipun untuk ABK kita cara berkomunikasi harus lebih halus.” (Wawancara, 11 Mei 2016)

Pernyataan guru PPKn di atas dibenarkan oleh bapak Muji selaku koordinator inklusif yaitu:

“Penentuan tata tertib di kelas inklusif itu sama kok mbak sama di kelas lain, hanya saja untuk anak ABK kita perhalus dalam memberikan pengertian mengenai tata tertib atau pelanggaran yang ia lakukan, ya kita kasih pengertian aja pelan-pelan ke mereka. Kan ABK itu kan labil to mbak, terus dia itu kan juga memiliki kekurangan jadi ya kalau kita marahin malah bikin mental mereka *down*, bisa ngamuk-ngamuk mereka di kelas. Kalau ada masalah dengan ABK biasanya guru PPKn bilang ke saya, nanti saya bantu untuk menyelesaikannya. Ya diberlakukan adila lah mbak tata tertibnya biar gak ada yang iri juga. Yang melanggar kita kasih hukuman.” (Wawancara, 16 Mei 2016)

Selain itu menurut Hasyim yakni salah satu peserta didik XI IPS 3 yang diajar oleh ibu Fety mengungkapkan bahwa:

“Bu Fety itu sabar mbak, jarang sekali menghukum, hanya ditegor saja, dikasih nasihat. Orangya juga adil, siapa yang melanggar pasti dikasih hukuman. ABK pernah bermain HP lalu diambil HPnya. Kalau ke anak ABK pelan sekali memberitahunya, ABK itu labil mbak, mudah

tersinggung, dan bisa marah-marahan mbak. Tapi kalau anak-anak keterlalaian biasanya dihukum juga, dikasih tau ke BP sama wali kelas.” (Wawancara, 13 Mei 2016)

Pernyataan hasyim juga diperkuat dengan Della selaku peserta didik XI IPS 4 yang juga diajar oleh ibu Fety yaitu:

“Bu Fety kalau mengajar itu enak, tidak jahat. Tata tertibnya sama saja dengan yang lain. Bu Fety kalau ada yang melanggar tata tertib hanya diingetin aja, sabar orangnya. Kalau sudah keterlalaian bu Fety lapor ke BP dan wali kelas. Orangya juga adil kalau menghukum, tidak peduli anaknya orang kaya atau miskin tetap saja dihukum.” (Wawancara, 11 Mei 2016)

Sedangkan menurut Gista yakni salah satu peserta didik XI IPS 2 yang diajar ibu Aini yaitu:

“Tata tertibnya sama saja, tapi bu Aini ini orangnya sabar, jadi jarang marah-marahan di kelas apalagi menghukum gitu. tapi lihat-lihat kesalahannya juga, kalau parah dilaporkan ke BP dan wali kelas gitu mbak, lalu diberi hukuman. Kalau biasanya ditegor atau dinasehati sama bu Aini. Ibu Aini tidak pandang bulu, siapa yang melanggar pasti dihukum.” (Wawancara, 11 Mei 2016)

Cara yang lain yang dipakai guru PPKn dalam penentuan tata tertib di kelas inklusif ialah dengan menggunakan kontrak atau kesepakatan bersama antara guru dengan peserta didik. Hal ini dituturkan oleh ibu Fety selaku guru kelas XI IPS 3 dan XI IPS 4 yaitu:

“...Cara lain ya saya gunakan yaitu kontrak mbak atau kesepakatan bersama dengan anak-anak. Kan asyik ya mbak, anak-anak yang buat, anak-anak yang melanggar dan anak-anak juga yang hukum hahah (tertawa lepas). Sebenarnya sih cuma ngebelajarkan mereka tanggungjawab aja sih mbak sama dirinya sendiri. Biasanya dengan cara ini tu anak-anak lebih mengingat tata tertibnya, sehingga terjadinya pelanggaran juga terminimalisir.” (Wawancara, 13 Mei 2016)

Hal serupa juga dinyatakan oleh ibu Aini selaku guru PPKn kelas XI IPS 2 yaitu:

“... Saya juga menumbuhkan kesadaran mereka mengenai pentingnya tata tertib mbak dengan cara membuat tata tertib bersama-sama. Jadi kita buat kesepakatan barang siapa yang melanggar ya kita hukum. Itu lebih asyik mbak, anak-anak gitu lebih paham mengenai pentingnya tata tertib.” (Wawancara, 11 Mei 2016)

Pernyataan di atas dibenarkan oleh peserta didik Hasyim selaku peserta didik XI IPS 3 yaitu:

“Dulu sih awal-awal kita buat kesepakatan emang mbak, ya misal kalau ada yang telat masuk kita hukum menyanyi, ya kayak gitu itu mbak.” (Wawancara, 13 Mei 2016)

Pernyataan Hasyim didukung oleh Della selaku peserta didik XI IPS 4 yang sama-sama diajar oleh ibu Fety yaitu:

“Iya mbak dulu awal kita emang bikin kontrak bareng gitu, kesepakatan lah. Jadi ada beberapa aturan yang emang kita buat sendiri dan kita sepakatin bersama.” (Wawancara, 11 Mei 2016)

Hal serupa juga di nyatakan oleh Gista selaku peserta didik XI IPS 2 yaitu:

“Iya mbak kita bikin kesepakatan bersama, siapa yang ngelanggar ya dihukum, tapi ya hukumannya gak ekstrem juga mbak, paling ya nyanyi atau hukuman yang ringan-ringan gitu biasanya mbak.” (Wawancara, 11 Mei 2016)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dalam penentuan tata tertib di kelas inklusif pada dasarnya sama saja dengan penentuan tata tertib di kelas reguler, hanya saja khusus untuk ABK hukuman lebih diringankan. Guru PPKn juga cenderung tidak langsung memberikan hukuman kepada peserta didik tetapi melalui peringatan terlebih dahulu atau pemberian penguatan-penguatan. Selain itu guru juga melakukan kerjasama dengan wali kelas, BK, koordinator inklusif, dan juga guru pendamping khusus dalam mengatasi masalah yang ada di kelas inklusif.

Guru PPKn dalam penentuan tata tertib di kelas inklusif menggunakan beberapa cara untuk membuat tata tertib ini menjadi baik dan dapat dilaksanakan dengan baik. Cara yang pertama yakni dengan memberlakukannya secara adil, jadi tidak ada pengecualian bagi peserta didik. hanya saja khusus ABK guru harus menggunakan cara halus dalam penyampaian. Cara yang kedua yang dipakai ialah dengan cara membuat kesepakatan bersama atau kontrak dengan peserta didik. dengan adanya kontrak ini diharapkan peserta didik lebih bertanggungjawab lagi dengan dirinya dan juga lebih mengetahui arti penting dari tata tertib itu sendiri.

Pengaturan penempatan dengan memberikan kesempatan peserta didik untuk berinteraksi juga harus diperhatikan oleh guru PPKn. Dalam hal ini guru melakukan beberapa cara agar anak-anak inklusif bisa berinteraksi bersama peserta didik lainnya dengan nyaman. Penempatan ini bertujuan agar peserta didik bisa berbagi satu sama lain dan juga anak reguler dapat memberikan pengaruh positif kepada ABK (tutor sebaya). Dalam pembelajaran PPKn guru tidak membatasi ABK untuk berinteraksi dengan anak reguler, bahkan guru sangat mendukung sekali kegiatan ini.

Hal di atas dapat diketahui melalui observasi partisipan yang dilakukan, yakni observasi pada tanggal 22 April 2016 di XI IPS 3. Pada kegiatan observasi diketahui bahwa dalam mengatur penempatan peserta didik, ibu Fety menggunakan metode berkelompok.

Pemilihan anggota kelompok dilakukan sendiri oleh ibu Fety dengan cara acak dan untuk ABK sendiri dibagi rata per kelompok. Ketika peserta didik mulai mengerjakan tugas kelompok, ibu Fety mulai berjalan memutar guna mengecek pekerjaan peserta didik. Ibu Fety juga mengingatkan kepada anak reguler untuk memberikan tugas kepada ABK agar ABK merasa dihargai keberadaannya, meskipun pekerjaan mereka kurang tepat. Ibu Fety juga menggunakan cara tersebut di kelas inklusif lain yakni di XI IPS 4. Pada observasi tanggal 4 Mei 2016 diketahui bahwa ibu Fety juga menggunakan cara yang sama seperti di kelas XI IPS 3 yakni dengan membentuk kelompok belajar.

Cara yang digunakan ibu Fety juga digunakan oleh bu Aini di kelas inklusif yakni kelas XI IPS 2. Pada observasi tanggal 27 April 2016 menunjukkan bahwa di kelas XI IPS 2 bu Aini menggunakan cara berkelompok untuk mengatur penempatan peserta didik untuk berinteraksi. Dimana ibu Aini sendiri yang melih anggota kelompok. Anggota kelompok dipilih secara acak dan juga adil, dimana semua ABK bisa tersebar rata. Selain itu ibu Aini juga selalu mengecek cara kerja kelompok dan selalu mengingatkan kepada peserta didik untuk mengikut sertakan ABK dalam kegiatan kelompok.

Berdasarkan observasi tersebut diketahui bahwa dalam pengaturan penempatan dengan memberikan kesempatan peserta didik untuk berinteraksi, guru menggunakan cara berkelompok. Dimana guru PPKn memilih sendiri anggota dari kelompok dengan cara mengacak peserta didik dan untuk ABK disebar merata disetiap kelompok. Ketika peserta didik sedang mengerjakan tugas kelompok, guru memeriksa setiap pekerjaan yang dilakukan oleh anggota kelompok. Guru PPKn juga tak lupa untuk mengingatkan kepada anak reguler untuk selalu memberikan tugas kepada ABK dan mengajak ABK untuk berdiskusi agar ABK merasa dihargai keberadaannya. Cara guru dalam pengaturan penempatan dengan memberikan kesempatan peserta didik untuk berinteraksi diperkuat dengan pernyataan dari guru PPKn ibu Fety selaku guru PPKn kelas XI IPS 3 dan XI IPS 4 yaitu:

“Cara saya biar anak-anak bisa berinteraksi satu sama lain yakni dengan cara berkelompok, karena saya anggap dengan begini anak-anak yang reguler bisa saling berbagi dengan anak inklusif. Mereka bisa saling berinteraksi, saling berbagi dan juga menghormati. Anak reguler bisa jadi tutor sebaya bagi anak inklusif mbak. Biasanya saya acak tu mereka mbak, yang inklusif juga saya bagi, pokoknya rata lah mbak.” (Wawancara, 13 Mei 2016)

Sedangkan menurut ibu Aini yaitu:

“Dalam mengatur penempatan peserta didik supaya dapat beinteraksi satu sama lain, saya

seringnya ya menyuruh berkelompok itu mbak, biar anak-anak ini tidak hanya berinteraksi dengan teman sebangku saja, terus biar anak-anak yang inklusif ini bisa berinteraksi dengan anak-anak reguler. Saya sih mengusahakan biar anak-anak ini bisa berbaur dengan yang lain, ya cara saya kelompokin mereka dengan acak, yang inklusif juga saya bagi rata, biar gak ngumpul jadi satu. Kalau gak diacak gitu ya pasti mbak anak-anak gak ada yang milih anak inklusif.” (Wawancara, 11 Mei 2016)

Guru PPKn selalu melakukan pengecekan terhadap anak-anak ketika berkelompok, hal ini bertujuan agar tidak ada anak yang tidak mengerjakan pekerjaan kelompok dan tidak ada diskriminasi antar peserta didik. Guru juga meminta anak reguler untuk tetap membagi tugas untuk ABK, agar ABK merasa dihargai dan diakui keberadaannya meskipun hasil pekerjaannya tidak sesuai. Hal ini diungkapkan oleh ibu Fety yaitu:

“Bisanya kalau sudah ngumpul dan mengerjakan saya sering datengi satu persatu mbak terutama kelompok yang ada anak inklusifnya, saya bilang kepada anak-anak reguler untuk memberikan tugas dan membantu anak inklusif, biar anak-anak inklusif juga aktif dalam kelompok dan juga mereka merasa dihargai keberadaannya.” (Wawancara, 13 Mei 2016)

Sedangkan menurut ibu Aini yaitu:

“saya biasanya keliling mbak, mengawasi kinerja anak2 juga. Biar anak yang inklusif juga dapat ambil bagian dalam kelompok, meskipun sedikit.” (Wawancara, 27 April 2016)

Pernyataan guru PPKn di atas dibenarkan oleh koordinator inklusif bahwa cara yang digunakan guru PPKn ini memang dianjurkan agar anak reguler dan ABK bisa saling berbagi dan menghormati satu sama lain. Menurut pak Muji yaitu:

“Ya sebenarnya dengan kelompokan gitu itu kan bisa membangun interaksi yang baik to mbak antara anak reguler dengan ABK, mereka bisa saling menghargai dan berbagi satu sama lain. Dengan berkelompok gini kan jadinya ABK tidak merasa terkucilkan, karena mereka bisa membaur dengan anak reguler. Kalau gak kayak gini ya gimana lagi mbak biar anak-anak bisa nyatu, soalnya ABK itu cenderung menyendiri dan bergaul dengan sesamanya eh.” (Wawancara, 16 Mei 2016)

Selain itu menurut Hasyim yakni salah satu peserta didik XI IPS 3 yang diajar oleh ibu Fety mengungkapkan bahwa :

“Bu Fety emang sering banget mbak buat kelompokan gitu, terus kita itu gak boleh milih anggota kita sendiri, semua yang ngatur itu bu Fety, jadi ya kita nerima aja. Kalau udah ngerjain gitu bu Fety pasti ngecek pekerjaannya anak-anak terus ya ngecek ABK juga.” (Wawancara, 13 Mei 2016)

Pernyataan Hasyim juga diperkuat dengan Della selaku peserta didik XI IPS 4 yang juga diajar oleh ibu Fety yaitu:

“Iya mbak bu Fety itu sering banget bikin kelompokan, mana kita gak boleh pilih sendiri. Semua diatur ma bu Fety, jadi ya rata, ABK rata disetiap kelompok. Terus bu Fety sering bilang ke anak-anak supaya ABK itu dikasih tugas juga biar mereka dihargai keberadaannya.” (Wawancara, 11 Mei 2016)

Sedangkan menurut Gista yakni salah satu peserta didik XI IPS 2 yang diajar ibu Aini yaitu:

“Bu Aini memang sering membentuk kelompok ketika pembelajaran, tapi orangnya yang memilih sendiri anggotanya, terkadang diacak terkadang juga diurut absen, lalu yang ABK dibagi rata disetiap kelompok. Lalu orangnya berkeliling waktu kerja kelompok buat ngecekin anak-anak.” (Wawancara, 11 Mei 2016)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dalam mengatur penempatan peserta didik, guru PPKn menggunakan metode berkelompok. Dimana guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Pemilihan anggota kelompok dilakukan sendiri oleh guru dengan cara mengacak anak reguler dan membagi rata ABK disetiap kelompok. Ketika kelompok sudah terbentuk dan tugas sudah dibagikan, guru mendatangi setiap kelompok untuk mengecek pekerjaan peserta didik. Guru juga mengingatkan kepada anak reguler untuk memberikan tugas kepada ABK agar ABK merasa dihargai keberadaannya, meskipun pekerjaan mereka kurang tepat.

Kegiatan ketiga yang juga harus diperhatikan oleh guru PPKn dalam mengelola kelas inklusif adalah pengelolaan lingkungan belajar, dimana guru harus bisa menciptakan lingkungan yang nyaman, tenang dan menyenangkan. Dengan kondisi kelas yang baik diharapkan dapat memotivasi peserta didik untuk belajar lebih giat lagi sehingga dapat mengoptimalkan hasil pembelajaran PPKn. Dalam hal ini guru PPKn melakukan berbagai cara agar bisa menciptakan suasana yang nyaman, tenang dan menyenangkan di dalam kelas. Hal tersebut dapat diketahui melalui hasil observasi partisipan yang dilakukan, yakni observasi pada tanggal 22 April 2016 di kelas XI IPS 3. Pada kegiatan observasi diketahui bahwa dalam mengelola lingkungan belajar ibu Fety menggunakan berbagai cara.

Cara pertama yang digunakan ibu Fety yakni dengan pemberian penguatan kepada peserta didik. Ibu Fety berkali-kali memberikan penguatan kepada peserta didik. Dalam beberapa kesempatan ibu Fety memberikan sebuah petuah kepada beberapa peserta didik untuk bisa menerima anggota kelas yang memiliki kekurangan (ABK). Selain itu bu Fety juga menggunakan permainan dalam pembelajaran. Peserta didik nampak senang dan

bersemangat ketika ibu Fety memulai permainan, selain itu peserta didik juga aktif dalam menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh ibu Fety.

Dalam pembelajaran PPKn ibu Fety juga menggunakan *reward* untuk memancing keaktifan siswa dan memunculkan sikap yang positif pada diri siswa. *Reward* ini tidak berbentuk barang melainkan berbentuk penilaian. Dimana ibu Fety memberikan nilai bagi peserta didik yang aktif dan bersikap baik selama pembelajaran PPKn berlangsung. Hal serupa juga dilakukan ibu Fety dikelas inklusif yang lain, yakni kelas XI IPS 4. Dimana ibu Fety juga menggunakan penguatan, permainan dan pemberian *reward* pada saat pembelajaran berlangsung.

Pada tanggal 11 Mei 2016 di kelas XI IPS 4, suasana kelas terlihat begitu hidup. Peserta didik terlihat senang dengan diadakannya sebuah permainan oleh ibu Fety. Peserta didik terlihat aktif dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh ibu Fety, selain itu peserta didik juga terlihat saling bekerjasama dengan anggota kelompok demi mendapatkan *reward*. Ibu Fety juga memberikan penguatan kepada ABK untuk ikut aktif dalam permainan ini. Cara yang dilakukan ibu Fety tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ibu Aini. Dimana dalam observasi partisipan yang dilakukan di kelas XI IPS 2 menunjukkan bahwa ibu Aini juga menggunakan pemberian penguatan, permainan dan juga *reward* untuk menciptakan suasana yang nyaman, tenang dan menyenangkan. Pada saat lomba debat, terlihat sekali antusias dari peserta didik, mereka berlomba-lomba untuk menjadi juara dalam lomba debat ini. Dalam hal ini ibu Aini juga menyiapkan *reward* bagi peserta didik yang aktif dalam mengikuti perlombaan debat.

Berdasarkan observasi tersebut diketahui bahwa dalam pengelolaan lingkungan lingkungan belajar, guru menggunakan cara memberikan penguatan kepada peserta didik, mengadakan permainan di setiap pembelajaran serta menggunakan *reward* untuk memancing keaktifan peserta dan memunculkan sikap positif. Cara guru dalam mengelola lingkungan belajar yang nyaman, tenang dan menyenangkan ini diperkuat dengan pernyataan dari guru PPKn ibu Fety selaku guru kelas XI IPS 3 dan XI IPS 4 yaitu:

“...Pertama-tama ya saya terlebih dahulu mengkondisikan peserta didiknya mbak, dengan cara ngasih penguatan. Dulu pada awal masuk saya bilang mbak ke anak-anak bahwa mereka harus bisa bersyukur diberikan kelebihan dibandingkan dengan beberapa temanmu, jadi tolong deh dihargain temenmu agar mereka bisa mandiri, bisa berkembang, walaupun pada perjalanan berikutnya mereka beberapa anak tidak bisa menerapkan itu, mungkin seharusnya mungkin perlu pendekatan lagi ke beberapa anak

yang tingkah lakunya belum bisa menerima keberadaan temennya. Kalau anak-anak reguler bisa nerima kan enak mbak, jadi ABK juga nyaman berada di kelas tersebut...” (Wawancara, 13 Mei 2016)

Sedangkan menurut ibu Aini yaitu:

“Kalau Saya mengajarkan mereka itu dengan kasih sayang, jadi kalau saya mengajar mereka itu dengan hati, jadi saya itu tidak melebihi yang inklusif dan tidak mengurangi yang reguler/normal, tapi saya ajak mereka itu melalui pendekatan-pendekatan, suatu ketika saya adakan pendekatan-pendekatan pribadi atau mungkin secara klasikal saya melakukan pendekatan agar kita ini saling bisa menerima kekurangan, tidak ada yang sempurna, maka dari itu ayok kita saling menyayangi dan menghargai....” (Wawancara, 11 Mei 2016)

Penggunaan permainan dalam pembelajaran juga dapat membuat suasana kelas menjadi menyenangkan. suasana kelas yang membosankan dapat membuat siswa merasa tidak nyaman di kelas. Hal ini diungkapkan oleh ibu Fety yaitu:

“...Saya mencoba membentuk semangat belajar mereka bahwa PPKn itu bukan pembelajaran yang membosankan tetapi pembelajaran yang mengasyikkan dengan berbagai cara, misal dengan permainan. Saya sering sekali mbak buat permainan gitu, lah tapi anak-anak itu kadang gak semangat gitu, ngantuk. Apalagi di kelas XI IPS 4 kan habis olahraga tu....” (Wawancara, 13 Mei 2016)

Sedangkan menurut ibu Aini yaitu:

“...Saya lihat mereka itu dalam kondisi yang suntuk itu ya bosan. Nah sekali waktu saya mengajak mereka belajar sambil bermain saja. Maka saya pilihkan topik-topik yang sesuai yang pas yang bisa memasukkan materi dalam permainan misal bermain peran, bermain ular tangga supaya mereka lebih termotivasi. Seperti tadi saya ajak mereka adu debat dan ternyata mereka antusias sekali, senang mau gak mau itu kan memotivasi mereka belajar....” (Wawancara, 11 Mei 2016)

Cara lain yang digunakan guru untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman, tenang dan menyenangkan adalah dengan pemberian *reward* disetiap kesempatan. Pemberian *reward* tidak harus dengan menggunakan barang atau benda, tetapi juga bisa menggunakan pujian dan pemberian nilai. Dalam pembelajaran PPKn guru selalu memberikan *reward* kepada semua peserta didik, baik anak yang reguler maupun ABK. Pemberian *reward* diberikan kepada peserta didik yang bisa menjawab pertanyaan guru dan melakukan tindakan yang positif. Dengan pemberian *reward* ini diharapkan peserta didik lebih bersemangat lagi untuk melaksanakan pembelajaran PPKn, terlebih lagi bagi ABK. Hal ini diutarakan langsung oleh ibu Fety yaitu:

“...Anak-anak itu mbak kalau gak dikasih *reward* ya diem ae, gak tergugah semangat. Kalau saya kasih nilai gitu setiap partisipasi mereka pasti mereka akan berlomba-lomba tu mbak buat aktif dikelas. Terus saya juga selalu memberikan pujian terhadap setiap pendapat anak-anak itu, ya terlebih lagi sih buat ABK ya mbak. Meskipun terkadang jawaban anak-anak salah ya saya tetap kasih pujian terus saya benarkan atau saya kasih sanggahan itu jawabannya. Terus saya biasanya juga menyuruh anak-anak untuk memberikan tepukan tangan kepada temannya yang sudah mau berpartisipasi biar anak-anak merasa dihargai jawabannya dan keberaniannya....” (Wawancara, 13 Mei 2016)

Sedangkan menurut ibu Aini yaitu:

“...Cara yang terakhir yakni dengan ngasih hadiah mbak, ya meskipun harganya gak seberapa sih, tapi itu cukup untuk menggugah anak-anak untuk aktif dalam pembelajaran. Saya kasih hadiah ya pas waktunya game itu mbak, kayak debat kemaren itu. Terus kalau anak-anak aktif menjawab pertanyaan saya ya saya kasih dia nilai tambahan juga mbak. Kalau untuk anak ABK sendiri sih saya kasih dia pujian juga terus nilai juga biar dia lebih semangat dan juga gak malu-malu mbak kalau mau berpendapat, mereka itu kan cenderung pendiam gitu gak mau kasih pendapat atau jawab-jawab gitu.” (Wawancara, 11 Mei 2016)

Pernyataan guru PPKn di atas dibenarkan oleh koordinator inklusif. Dalam mengelola kelas inklusif memang seharusnya ada pemberian *reward* kepada peserta didik, terutama untuk ABK. Hal ini diutarakan oleh bapak Muji yaitu:

“Ya sebenarnya kan yang bagus itu gitu mbak, gak harus di kelas inklusif juga seh, semua kelas juga harusnya gitu. Anak sekarang itu kalau dikasih hadiah gitu pasti kurang bersemangat. Kalau untuk ABK nya sendiri sih itu penting banget mbak, karena ABK ini kan anaknya cenderung pasif kan, pemalu gitu, jadi ya harus dikasih semangat dengan cara pemberian hadiah atau pujian gitu. Kalau dipuji gitu kan mereka merasa lebih dihargai. Kalau pelajaran dikasih permainan gitu ya pasti anak-anak senang banget mbak, gak ngantuk kan. Apalagi ABK pasti senang itu mengikuti pembelajaran.” (Wawancara, 16 Mei 2016)

Selain itu menurut menurut Hasyim yakni salah satu peserta didik XI IPS 3 yang diajar oleh ibu Fety mengungkapkan bahwa :

“Bu Fety itu sering mbak emang bikin permainan gitu trus kalau menang kita ya dapet hadiah, ya meskipun cuma nilai juga. Tapi itu aja anak-anak udah senang banget mbak, gak bikin ngantuk.” (Wawancara, 13 Mei 2016)

Pernyataan Hasyim juga diperkuat oleh Della peserta didik XI IPS 4 yang juga diajar oleh ibu Fety yaitu:

“Kalau waktunya PPKn itu enak mbak, gak ngebosenin. Ibu Fety sering ngadain permainan trus ada hadiahnya juga. Jadi gak ngantuk” (Wawancara, 11 Mei 2016)

Sedangkan menurut Gista yakni salah satu peserta didik XI IPS 2 yang diajar ibu Aini yaitu:

“Bu Aini kalau ngajar sering juga mbak ngadain permainan gitu, terus dikasih hadiah juga, terus kalau ada anak-anak yang aktif juga pasti dikasih nilai lebih.” (Wawancara, 11 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam mengelola lingkungan belajar, guru PPKn menggunakan beberapa cara. Cara yang pertama yakni pemberian penguatan kepada peserta didik agar bisa menerima perbedaan yang ada di kelas dan menghargai keberadaan ABK dengan keterbatasannya. Cara yang kedua yakni dengan menggunakan permainan dalam setiap pembelajaran, dimana permainan ini dapat membuat suasana kelas menjadi menyenangkan. Cara lain yang digunakan guru PPKn yakni dengan pemberian *reward*. Hal ini tentunya membuat peserta didik menjadi semakin termotivasi dan terpacu untuk aktif dan berperilaku positif dalam pembelajaran.

Hal ke empat yang harus diperhatikan guru dalam mengelola kelas inklusif adalah penyediaan media belajar. Penyediaan media belajar mempunyai pengaruh dalam pembelajaran di kelas inklusif. Pasalnya dengan pengadaan media pembelajaran yang menarik dapat membuat siswa semakin termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Penyediaan media pembelajaran juga membantu guru dalam mengkomunikasikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Dalam menyediakan media belajar guru harus mengikuti perkembangan zaman yang ada, di zaman yang canggih ini banyak media-media yang dapat dipakai untuk menunjang proses pembelajaran, misalnya saja dengan LCD. Penyediaan media pembelajaran membantu guru dalam mengkomunikasikan materi pembelajaran kepada peserta didik.

Hal di atas dapat diketahui melalui observasi partisipan yang dilakukan pada tanggal 29 April 2016 di kelas XI IPS 3. Pada kegiatan observasi diketahui bahwa dalam melaksanakan pembelajaran PPKn ibu Fety menggunakan beberapa media belajar antara lain LCD, Laptop, Sound, dan juga nomer dada untuk permainan. Kondisi kelas XI IPS 3 yang memiliki ABK dengan kategori tunarungu membuat ibu Fety selalu berusaha untuk menggunakan LCD guna mempermudah menjelaskan materi pembelajaran. Penggunaan media ini memberikan pengaruh cukup besar kepada peserta didik. Dimana peserta didik terlihat lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran jika dibandingkan dengan tidak memakai media, seperti yang terlihat pada observasi pada tanggal 22 April 2016.

Dalam mengelola kelas inklusif yang lain yakni XI IPS 4, bu Fety juga menggunakan media yang sama. Hal ini dapat diketahui melalui observasi partisipan yang dilakukan pada tanggal 4 Mei 2016. Kondisi peserta didik yang tidak stabil karena setelah melakukan olahraga membuat ibu Fety harus menggunakan media yang dapat menarik perhatian peserta didik. Media yang digunakan ibu Fety untuk menarik perhatian peserta didik antara lain LCD, sound, laptop, dan peralatan untuk bermain. Peralatan bermain ini berupa stik/tongkat dan juga nomer dada.

Cara yang hampir sama juga dilakukan oleh ibu Aini selaku guru kelas inklusif XI IPS 2. Pada observasi partisipan tanggal 27 April 2016 menunjukkan bahwa ibu Aini menggunakan beberapa media untuk mendukung debat di kelas. Media yang digunakan berupa selembar kertas yang berisikan mengenai materi yang akan diperdebatkan oleh peserta didik.

Berdasarkan observasi tersebut diketahui bahwa dalam pembelajaran PPKn, guru menggunakan beberapa media untuk menarik perhatian peserta didik. Media tersebut berupa LCD, laptop, sound, dan juga perlengkapan ketika melaksanakan permainan atau debat. Media yang disediakan oleh guru PPKn sekiranya sudah mengikuti perkembangan zaman, pasalnya dengan guru PPKn menggunakan beberapa alat teknologi canggih dalam pembelajarannya, misal saja Laptop dan LCD. Penyediaan media belajar yang dilakukan oleh guru PPKn diperkuat dengan pernyataan dari guru PPKn ibu Fety selaku guru PPKn kelas XI IPS 3 dan XI IPS 4 yaitu:

“Kalau di kelas inklusif ya sama saja sihnya mbak sebenarnya sama kelas-kelas reguler, tapi kalau ada anak seperti Nabila di ips 3 itu ya sebaiknya pakai LCD untuk memudahkan dia, biar dia bisa paham dengan apa yang saya ajarkan. Kalau gak bisa ya saya tulis aja poin-poin di papan. Saya juga ngikuti perkembangan zaman mbak, biar gak gaptek, dan anak-anak juga suka sama pembelajaran PPKn, jadi gak monoton nulis aja. Selain itu saya usahakan agar media ini bisa digunakan siapa saja” (Wawancara, 13 Mei 2016)

Sedangkan menurut ibu Aini yaitu:

“Kalau media pembelajaran antara anak inklusif dan anak reguler ya biasanya saya samakan. Mengikuti anak reguler, karena biasanya ketika saya memberikan suatu media pembelajaran saya menerapkan agar media itu bisa dipakai untuk anak reguler dan juga inklusif. Selain itu saya juga menggunakan media sesuai dengan perkembangan zaman mbak, ya biar sama lah gak kuno gitu, misal dengan LCD ini, dulu kan gak ada mbak.” (Wawancara, 11 Mei 2016)

Pernyataan guru PPKn di atas diperkuat dengan pernyataan Hasyim selaku peserta didik di XI IPS 3, yaitu:

“Bu Fety itu kreatif, banyak media yang dipakai, mengikuti perkembangan zaman juga. Ada LCD, laptop, *sound*, lalu mainan-mainan juga orangnya menyediakan. Seperti nomer dada, lalu stick untuk bermain, pokoknya banyak, tergantung permainannya.” (Wawancara, 13 Mei 2016)

Pernyataan Hasyim juga diperkuat dengan Della selaku peserta didik XI IPS 4 yang juga diajar oleh ibu Fety yaitu:

“Biasanya yang selalu digunakan bu Fety adalah LCD, laptop, *sound* dan perlengkapan permainan gitu. Seperti nomer dada, *stick*, dll. Medianya bisa dipakai buat anak reguler juga buat anak inklusif.” (Wawancara, 11 Mei 2016)

Sedangkan menurut Gista yakni salah satu peserta didik XI IPS 2 yang diajar bu Aini yaitu:

“Iya biasanya bu Aini juga macam-macam medianya, kreatif lah. Tapi ini tadi kan debat jadi bawa kertas aja buat materi debat sama buat ngocok pembagian kelompok. Biasanya pakai laptop juga, LCD juga, tergantung aktivitasnya juga.” (Wawancara, 11 Mei 2016)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dalam penyediaan media pembelajaran di kelas inklusif, guru PPKn menggunakan beberapa strategi agar media pembelajaran dapat memotivasi peserta didik. Strategi yang pertama yakni dengan mengikuti perkembangan zaman, dimana media yang digunakan sudah menggunakan media yang canggih seperti laptop dan LCD. Selain itu strategi lain yang digunakan guru PPKn ialah dengan menyediakan media pembelajaran yang dapat dipakai oleh semua peserta didik baik reguler maupun berkebutuhan khusus.

Kegiatan kelima yang harus diperhatikan oleh guru PPKn adalah pengaturan tempat duduk. Dimana guru harus bisa mengatur tempat duduk peserta didik agar peserta didik nyaman dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Guru PPKn memiliki otoritas dalam mengatur tempat duduk peserta didik ketika pembelajaran PPKn. Ada kalanya guru memindah peserta didik yang sekiranya menurut guru tidak sesuai tempat duduknya. Di kelas inklusif penempatan tempat duduk siswa ABK memang sudah diatur langsung oleh koordinator inklusif, akan tetapi peserta didik sering pindah-pindah tempat duduk baik anak reguler maupun ABK.

Hal di atas dapat diketahui melalui observasi partisipan yang dilakukan pada tanggal 22 April 2016 di XI IPS 3. Pada saat pembelajaran PPKn terdapat ABK yang berpindah-pindah tempat duduk di belakang, alhasil ibu Fety selalu memindahkan ABK tersebut ke depan. ABK selalu berpindah-pindah tempat duduk ketika

pembelajaran PPKn, hal ini dapat dilihat ketika melakukan beberapa kali observasi yakni pada tanggal 29 April, 6 Mei dan 13 Mei 2016. Selain itu ibu fety juga memindahkan peserta didik yang dianggap membuat gaduh ke depan kelas agar mudah untuk mengontrol.

Hal serupa juga terjadi di kelas inklusif lain yakni di kelas XI IPS 4. Dimana ibu fety juga sering sekali memindahkan ABK yang suka berpindah-pindah tempat duduk terutama dibelakang. Pada observasi tanggal 4 Mei 2016 diketahui bahwa ada salah satu ABK yang suka sekali duduk dibelakang bersama teman-teman reguler. Akan tetapi ibu Fety selalu memindahkannya di depan bersama ABK yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk lebih mudah mengawasi dan membimbingnya. Ibu Fety juga memindahkan beberapa anak reguler yang membuat gaduh dikelas.

Cara yang dilakukan ibu Fety juga dilakukan oleh ibu Aini selaku guru di kelas inklusif XI IPS 2. Pada observasi partisipan yang dilakukan pada tanggal 27 April 2016 terlihat bahwa ibu Aini sering memindahkan ABK ke depan karena ada ABK yang memang suka duduk di belakang bersama teman regulernya. Ibu Aini memindahkan ABK ke depan bersama ABK yang lainnya. Pemindahan ini hampir dilakukan setiap pembelajaran PPKn karena ABK memang suka duduk di belakang bersama peserta didik reguler. Pemindahan juga dilakukan oleh ibu Aini kepada peserta didik yang suka membuat gaduh di kelas.

Berdasarkan observasi tersebut diketahui bahwa dalam pengaturan tempat duduk, guru PPKn selalu meletakkan ABK di depan. Tak jarang ABK suka berpindah tempat duduk di belakang bersama peserta didik reguler, alhasil guru PPKn harus memindahkan lagi ABK tersebut ke depan. Selain itu guru PPKn juga sering memindah peserta didik yang dianggap membuat gaduh ke depan kelas untuk memudahkan guru untuk mengawasi perilaku peserta didik tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari ibu Fety selaku guru kelas XI IPS 3 dan XI IPS 4 yaitu:

“Kalau penempatan duduk di kelas inklusif itu biasanya sudah diatur mbak sama orang-orang yang berkecimpung di dunia perinklusion, ya koordinatornya itu seperti pak Muji. Kalau di pelajaran PPKn juga sering saya pindah mbak ketika ada anak inklusif ada yang tempat duduknya kurang tepat menurut saya, misalnya si Wahyu itu mbak, kan dia sering duduk di belakang maka saya sering pindah dia duduk di depan supaya saya juga lebih mudah untuk mengawasi dan membimbingnya. Kalau di ips 4 biasanya juga saya sering memindah murid inklusif biar mudah membimbingnya. Kan Jeop itu juga sering pindah-pindah tempat juga mbak.” (Wawancara, 13 Mei 2016)

Sedangkan menurut ibu Aini yaitu:

“Waktu awal saya ngajar sih mbak duduknya anak-anak ya sudah gitu, sudah diatur kayaknya sama koordinator inklusif dan juga wali kelasnya. ABK ditaruh didepan semua. Tapi pas pelajaran saya tu hohon itu sering mbak pindah-pindah gitu duduknya di belakang sama anak-anak reguler. Sama saya ya saya pindah, dia kan penglihatannya kurang lah kok malah di belakang, kan ya malah gak bisa apa-apa mbak. Kalau ABK tempat duduknya di depan semua kan enak mbak saya ngawasinya.” (Wawancara, 11 Mei 2016)

Penuturan guru PPKn tersebut dibenarkan oleh koordinator inklusif, bahwa pada tahun ajaran baru koordinator inklusif bekerja sama dengan wali kelas dan guru pendamping untuk mengatur tempat duduk peserta didik di kelas inklusif agar kondisi kelas menjadi nyaman dan peserta didik bisa belajar dengan baik. Menurut bapak Muji yaitu:

“Iya mbak dulu sih waktu tahun ajaran baru saya yang mengatur tempat duduk anak-anak di kelas inklusif, ya tujuannya sih biar anak inklusif itu mendapatkan tempat yang nyaman. Tapi ya namanya juga anak-anak, udah dibentuk gitu ya kadang masih pindah aja mbak sama temen-temennya yang bikin mereka nyaman.” (Wawancara, 16 Mei 2016)

Selain itu peserta didik XI IPS 3 yaitu Hasyim juga membenarkan pernyataan dari ibu Fety yaitu:

“Dulu waktu awal tempat duduknya diatur sama pak muji dan wali kelas, tapi anak-anak masih sering pindah-pindah. Wahyu itu selalu duduk dibelakang, tapi waktunya ibu Fety dipindah di depan duduk sama Rohim. Kemudian kalau ada yang ramai gitu juga dipindah di depan, kayak Yoga.” (Wawancara, 13 Mei 2016)

Pernyataan Hasyim juga diperkuat oleh Della peserta didik XI IPS 4 yang juga diajar oleh ibu Fety yaitu:

“Ibu Fety sering mbak mindah tempat duduknya temen-temen. Kayak yang Hohon itu yang anak inklusif, dia kan sering tu duduk dibelakang, lah itu dipindah sama ibu fety. Padahal dulu itu ya udah diatur juga mbak waktu awal tahun jaran baru, tapi ya tetep ae anak-anak pindah.” (Wawancara, 11 Mei 2016)

Sedangkan menurut Gista yakni salah satu peserta didik XI IPS 2 yang diajar ibu Aini yaitu:

“Bu Aini mengaturnya ya ABK tu ditaruh di depan semua mbak, terus yang ramai gitu suka ditaruh di depan juga. Sebenarnya sih dulu udah diatur tempat duduk ma wali kelas dan pak Muji tapi gara-gara anak-anak sering pindah makanya sering juga dipindah lagi sama bu Aini.” (Wawancara, 11 Mei 2016)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa cara guru dalam mengatur tempat duduk peserta didik ialah dengan menempatkan ABK di depan kelas. Hal ini dikarenakan untuk mempermudah guru untuk mengawasi

dan membimbing ABK. Selain itu guru juga memindahkan tempat duduk peserta didik yang dianggap membuat masalah atau membuat gaduh kelas, hal tersebut dilakukan untuk memudahkan guru untuk mengawasi perilaku peserta didik dan juga meminimalisir terjadinya masalah dalam pembelajaran PPKn.

Hal yang terakhir yang harus diperhatikan oleh guru PPKn dalam mengelola kelas inklusif adalah mengakomodasi kebutuhan belajar sesuai kebutuhan khusus peserta didik. Setiap peserta didik tentunya memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan karakteristiknya. Hal ini yang menjadi sorotan guru ketika melaksanakan pembelajaran di kelas inklusif. Adanya ABK dengan karakteristik yang berbeda-beda membuat guru harus memikirkan cara agar kebutuhan ABK ini bisa terpenuhi.

Dalam pembelajaran PPKn di kelas inklusif, guru PPKn berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhan setiap peserta didik. Terlebih lagi dalam pembelajaran PPKn kebutuhan peserta didik masih belum terpenuhi secara baik, misalnya saja pengadaan guru pendamping khusus dikelas, kurangnya fasilitas, dll. Oleh karena itu dalam mengakomodasi kebutuhan peserta didik guru memiliki strategi agar kebutuhan peserta didik dapat dipenuhi, yakni dengan menggunakan alternatif-alternatif lain yang dapat digunakan sebagai pengganti kebutuhan peserta didik. Hal tersebut dapat diketahui melalui observasi partisipan yang dilakukan pada tanggal 29 April 2016 di XI IPS 3.

Pada kegiatan observasi diketahui bahwa ibu Fety berusaha memenuhi kebutuhan setiap peserta didik. Di XI IPS 3 ini terdapat tiga ABK yang memiliki kategori tunarungu dan *borderline*. Ketika ibu Fety menjelaskan mengenai materi pembelajaran, ibu Fety menggunakan LCD sebagai perantara untuk menyampaikan materi, jika LCD tidak tersedia maka ibu Fety akan menggunakan papan tulis guna mencatat pokok-pokok materi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ABK tunarungu. Selain itu ibu Fety juga selalu bertatap muka dengan ABK tunarungu ketika sedang berkomunikasi. Sedangkan untuk ABK dengan kategori *borderline* ibu Fety mengajarkan materi PPKn dengan kesabaran dan ketelatenan, selain itu ibu Fety juga menggunakan beberapa media yang menarik guna memotivasi ABK untuk lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran PPKn.

Sedangkan di kelas inklusif yang berbeda yakni di XI IPS 4, ibu Fety juga terlihat untuk selalu memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Pada saat observasi partisipan yang dilakukan pada tanggal 4 Mei 2016 diketahui bahwa dalam pembelajaran PPKn ibu Fety berusaha memenuhi kebutuhan peserta didik berdasarkan kategorinya. Untuk ABK dengan kategori tunagrahita,

ibu Fety terlihat memberikan motivasi-motivasi terhadap ABK berupa kata-kata yang dapat membangkitkan semangat ABK dan juga memberikan *reward* atas apa yang dilakukan ABK. Sedangkan untuk anak tunadaksa, ibu Fety menempatkannya di bagian depan kelas, ibu Fety juga tidak memindahkan ABK ketika berkelompok. Selain itu ibu Fety juga membantu ABK dengan kategori tunagrahita untuk berkomunikasi.

Hal serupa tidak hanya dilakukan oleh ibu Fety saja, tetapi juga dilakukan oleh guru PPKn lain yakni ibu Aini. Dalam observasi partisipan yang dilakukan pada tanggal 27 April 2016 di kelas XI IPS 2 terlihat bahwa ibu Aini memenuhi beberapa kebutuhan peserta didik. Di kelas XI IPS 2 ini terdapat 3 ABK yang memiliki kategori *low vision*, *borderline* dan autisme. Dalam pembelajaran ibu Aini sering membacakan materi pembelajaran untuk ABK dengan kategori *low vision*. Hal ini dilakukan karena ABK tidak disediakan kaca pembesar dan juga media yang dapat diperbesar atau diraba. Kemudian ibu Aini juga mengajarkan dengan penuh kesabaran dan ketelatenan untuk ABK *low vision*. Ibu Aini juga sering membentuk kelompok-kelompok kecil dalam pembelajaran guna membiasakan ABK dengan kategori autisme untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain. Selain itu ibu Aini juga menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dengan mengadakan permainan.

Berdasarkan observasi di atas dapat diketahui bahwa guru PPKn selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Dengan kurang terpenuhinya kebutuhan peserta didik maka guru menggunakan beberapa alternatif lain guna mengganti kebutuhan belajar peserta didik. Guru PPKn memenuhi kebutuhan berdasarkan kategori peserta didik. Hanya saja tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi oleh guru PPKn. Dalam proses pembelajaran guru berusaha semaksimal mungkin agar kebutuhan peserta didiknya terpenuhi. Untuk ABK dengan kategori tunarungu guru memenuhi kebutuhannya dengan selalu menggunakan LCD tapi jika LCD tidak ada maka guru akan menuliskan materi di papan tulis, berusaha untuk selalu di depan kelas ketika menjelaskan materi pembelajaran, dan juga bertatap muka langsung dengan ABK ketika berkomunikasi.

Sedangkan untuk ABK dengan kategori *borderline*, guru harus sabar dan telaten dalam menjelaskan materi pembelajaran dan guru menyediakan media yang menarik agar mereka tertarik dengan materi yang diajarkan. Untuk ABK dengan kategori *low vision*, guru hanya membacakan materi yang diajarkan atau yang ada di buku karena di sekolah tidak ada kaca pembesar. Selain itu untuk ABK dengan kategori autisme, guru sesering mungkin menggunakan metode berkelompok supaya ABK ini bisa bersosialisasi dengan teman-temannya.

Dalam pembelajaran PPKn guru sering memberikan motivasi terhadap ABK dengan kategori tunagrahita agar ABK mau mengerjakan tugas dan mau berpartisipasi di dalam kelas. Sedangkan untuk ABK dengan kategori tunadaksa, guru selalu memperhatikan tata letak ABK dengan tidak memindah-mindah tempat atau terus berada di posisi depan sekalipun pada saat berkelompok. ABK dengan kategori tunadaksa juga memiliki suara yang pelan, sehingga dalam berpendapat guru harus mengulangnya lagi agar peserta didik lain mengetahui pendapat dari ABK, selain itu guru juga harus mendekat ketika berkomunikasi. Hal tersebut diperkuat dengan penuturan dari guru PPKn ibu Fety yaitu:

“Kalau untuk memenuhi kebutuhan peserta didik sih ya mbak ya saya berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan kategori dan karakteristik mereka. Nah di XI IPS 3 ini kana ada Nabilla yang tunarungu, nah itu saya usahakan untuk selalu menggunakan LCD, terus saya juga selalu berada di depan ketika menjelaskan, kemudian saya juga ketika berkomunikasi dengan Nabila itu selalu berhadapan langsung dengan dia dan saya menggunakan gerak bibir yang jelas agar terbaca sama dia. Sedangkan untuk Rohim sama Wahyu yang sama-sama *borderline* itu ya saya harus sabar dan telaten mbak ngajari mereka itu, terus media nya juga saya usahakan untuk lebih menarik lagi bair mereka tertarik sama materi yang saya ajarkan” (Wawancara, 13 Mei 2016)

Dikesempatan yang sama ibu Fety juga mengutarakan mengenai kebutuhan yang harus beliau penuhi di kelas inklusif lain yakni di XI IPS 4. Ibu Fety mengatakan bahwa:

“...Di IPS 4 ini ABK nya hanya dua yakni Jeop dan Laura. Jeop itu kategori tunagrahita mbak, hal yang perlu saya lakukan ya saya kasih dia motivasi-motivasi biar dia semangat untuk belajar PPKn, dan itu terbukti lo mbak, kalau waktue PPKn itu dia senang, aktif juga, bahkan dia pernah bilang pingin jadi *lawyer*. Kalau Laura sih sama tunagrahita juga tapi dia juga tunadaksa mbak, kebutuhannya sama kayak Jeop, tambahan sih ya saya harus selalu meletakkan Laura itu di depan terus, gak pindah-pindah mbak meskipun kelompokan gitu, terus kalau bicara juga kecil banget jadi saya bantu juga kalau mengungkapkan pendapat gitu.” (Wawancara, 13 Mei 2016)

Sedangkan menurut bu Aini yaitu :

“Pemenuhan kebutuhannya anak-anak ya sebisa mungkin saya penuhi mbak, kalau reguler kan sama aja, lah yang ABK ini, kadang saya bingung juga mbak gak ada pendamping gini. Di kelas itu kan ada Hohon yang penglihatannya kurang, lah itu dia gak punya kaca pembesar jadi ya dia kalau baca itu deket banget mbak, akhirnya kalau pelajaran gitu kadang saya bacakan saja, kadang juga temannya. Kalau Dewi itu *boderline* mbak,

tapi dia itu yang paling labil sifate, jadi saya itu harus telaten banget ngajarin dia, ngasih motivasi ke dia, ngasih penguatan juga. Terus ada Fawas juga mbak, dia ini Autis dan juga *borderline*, ya hampir sama ya kebutuhannya sama dewi, trus saya sesering mungkin juga menggunakan metode berkelompok biar Fawas ini mau bersosialisasi dengan teman-temannya. Ya pokoknya saya sebisa mungkin memenuhi lah mbak, buat media juga harus semenarik mungkin dan juga yang penting kondisi kelas itu biar anak-anak inklusif ini emosinya tetap terjaga.” (Wawancara, 11 Mei 2016)

Penuturan guru PPKn di atas dibenarkan oleh bapak

Muji yaitu:

“ABK di SMA ini kan kategorinya beragam mbak, gak cuma satu aja, kalau yang kelas sebelas ini ada delapan ABK dengan enam kategori kekurangan. Ada yg *low vision*, *borderline*, autis, tunarungu, tunagrahita dan juga tunadaksa. Nah satu ABK itu terkadang mempunyai dua kategori lo mbak. Nah kita sendiri disini sebisa mungkin sih memenuhi kebutuhan belajar mereka mbak, ya meskipun dengan keterbatasan kami, ya misal alat atau media yang tidak mendukung, terus ya pendampingan GPK yang kurang, jadi semampu kita aja mbak memenuhinya itu, tapi kita usaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan kategorinya.” (Wawancara, 16 Mei 2016)

Selain itu peserta didik XI IPS 3 yaitu Hasyim juga membenarkan pernyataan dari ibu Fety yaitu:

“Biasanya sih kalau ngobrol sama Nabila itu deketan gitu mbak, *face to face*. Terus orangnya tu kalau gak pakai LCD ya nulis di papan gitu mbak, mungkin kasihan sama Nabilla gak bisa denger jadi ya ngelihat apa yg ada di depan aja. Terus kalau ke rohim ma wahyu ya paling jelasin ke mereka lagi dengan telaten, nanyain pelan-pelan kepaahaman mereka.” (Wawancara, 13 Mei 2016)

Pernyataan lain diungkapkan oleh peserta didik XI IPS 4 yaitu:

“Bu Fety biasanya ngasih motivasi-motivasi gitu mbak ke Jeop ma Laura. Terus Laura itu ditaruh didepan dan gak pernah pindah-pindah. Kan Laura pakai kursi roda, jadi ya kalau misal kelompokan ya tetap ditaruh di depan biar gak nyusahin Laura juga.” (Wawancara, 11 Mei 2016)

Sedangkan menurut Gista yakni salah satu peserta didik XI IPS 2 yaitu:

“Bu Aini kalau ngajarin ABK itu ya suabar gitu mbak, telaten, pelan-pelan banget ngasih taunya. Terus dikasih motivasi gitu biar mau belajar, ya kayak Dewi ma Fawas itu kan agak labil gitu mbak. Kalau Hohon sih paling Cuma dibacain aja materinya. Kalau buat anak reguler ya menyesuaikan aja kayak biasanya.” (Wawancara, 11 Mei 2016)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dalam mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik, guru PPKn memiliki cara lain atau alternatif untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang belum terpenuhi secara optimal. Guru PPKn selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Untuk ABK tunarungu guru menyiapkan LCD sebagai perantara menyampaikan materi pembelajaran, kemudian guru dalam berkomunikasi selalu berhadapan dengan ABK dengan menggunakan gerak bibir yang jelas. Sedangkan untuk anak ABK *borderline* guru mengajarkannya dengan kesabaran dan ketelatenan serta membuat media pembelajaran yang menarik agar ABK tertarik untuk mengikuti pembelajaran.

Kebutuhan ABK tunagrahita hanya dipenuhi dengan memotivasi mereka agar mau mengikuti pembelajaran PPKn. Sedangkan untuk ABK tunadaksa, guru PPKn memenuhi kebutuhannya dengan meletakkan ABK diposisi yang strategis dan tidak berpindah-pindah tempat serta membantunya dalam berkomunikasi. Untuk ABK *low vision* guru hanya membacakan materi pembelajaran saja dan untuk ABK autisme guru hanya memenuhinya dengan cara membentuk sebuah kelompok belajar dan menciptakan suasana yang nyaman di kelas tersebut.

Pembahasan

Dari hasil penelitian di SMA Negeri 1 Gedangan diketahui bahwa dalam mengelola kelas inklusif guru PPKn menggunakan beberapa cara untuk mengatasi permasalahan yang ada di kelas inklusif yakni tidak adanya pendampingan dari guru pendamping khusus ketika mengajar. Dalam pembelajaran PPKn di kelas inklusif, guru PPKn hampir tidak pernah mendapatkan pendampingan dari guru pendamping khusus, alhasil guru PPKn harus mengganda tugasnya yakni sebagai guru mata pelajaran dan juga sebagai guru pendamping khusus. Hal ini tentunya menyulitkan guru dalam mengajar PPKn di kelas inklusif. Pasalnya di kelas inklusif terdapat beberapa ABK yang memiliki kategori dan kebutuhan yang berbeda-beda, terlebih lagi ABK tersebut memiliki emosional yang labil. Pengetahuan guru PPKn juga hanya sebatas pengetahuan umum mengenai mata pelajaran dan tidak begitu paham mengenai dunia perinklusi.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru PPKn ketika melaksanakan pembelajaran PPKn di kelas inklusif yaitu penentuan tata tertib, pengaturan penempatan peserta didik untuk berinteraksi, pengelolaan lingkungan belajar, penyediaan media belajar, pengaturan tempat duduk, dan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik. Ke enam hal tersebut harus diperhatikan oleh guru PPKn ketika mengajar di kelas inklusif agar

suasana kelas menjadi nyaman, tenang dan menyenangkan, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan bisa tercapai.

Penjelasan hasil penelitian yang sudah dilakukan baik observasi, wawancara dan dokumentasi dapat dikaitkan dengan teori behaviorisme B.F. Skinner yang berpandangan bahwa belajar terjadi melalui *operant conditioning* atau pembiasaan perilaku respon. Respon dalam *operant conditioning* terjadi karena adanya *reinforcement* atau penguatan. Terdapat dua *reinforcement* dalam *operant conditioning* yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif merupakan stimulus yang apabila ditambahkan dalam suatu situasi akan memperkuat individu dalam memberikan respon. Sedangkan penguatan negatif adalah suatu stimulus yang apabila dipindahkan dari suatu situasi dapat memperkuat terjadinya respon.

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini pemberian penguatan positif terhadap peserta didik dapat dilakukan dengan memberikan motivasi, nasihat-nasihat atau petunjuk, reward dan juga pemenuhan kebutuhan peserta didik. Dalam hal ini guru memberikan penguatan positif untuk membentuk suatu perilaku yang diharapkan kepada peserta didik. Untuk peserta didik reguler guru mengharapkan agar peserta didik dapat menerima perbedaan yang ada di kelas, dapat bersosialisasi dengan ABK, menghargai keberadaan ABK, aktif di dalam kelas, dsb. Selain itu guru juga memberikan penguatan kepada peserta didik guna menghilangkan perilaku negatif peserta didik seperti menyalahgunakan *gadget*, tidur dalam kelas dan membully teman.

Sedangkan untuk peserta didik berkebutuhan khusus, guru memberikan penguatan positif guna menghilangkan perilaku negatif seperti emosi yang labil, kurang percaya diri dan tidak suka bersosialisasi dengan peserta didik reguler. Selain itu guru juga ingin memunculkan perilaku positif peserta didik seperti menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan dapat bersosialisasi dengan teman-temannya.

Di dalam *operant conditioning* juga terdapat punishment. Dalam penelitian ini pemberian punishment dilakukan ketika peserta didik melakukan perbuatan yang negatif misalnya membully, bermain HP, dan tidur dalam kelas. Guru memberikan hukuman berdasarkan beban dari pelanggaran yang dilakukan peserta didik. Contohnya ketika peserta didik menyalahgunakan HP pada saat pembelajaran, maka pada awal-awal guru akan mengingatkan. Jika peserta didik tidak bisa diingatkan maka guru akan menyita HP peserta didik dan memanggil orang tua peserta didik. Dengan pemberian penguatan, *reward* dan *punishment* diharapkan dapat membentuk perilaku positif peserta didik, sehingga suasana kelas dapat di kendalikan dengan baik oleh guru.

Pada saat penelitian ditemukan temuan data lain yakni mengenai kendala dalam melaksanakan pengelolaan inklusif. Dalam melaksanakan pembelajaran PPKn di kelas inklusif ada beberapa kendala yang menghambat proses pembelajaran. Kendala ini berupa kebutuhan peserta didik ABK yang tidak terpenuhi. Berdasarkan observasi tersebut diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran PPKn terdapat kendala yang menghambat pembelajaran. Kendala ini berupa tidak terpenuhinya kebutuhan belajar peserta didik. Kebutuhan peserta didik yang tidak terpenuhi diantara lain yakni kurangnya latihan soal bagi ABK *borderline* dan tunagrahita. Selain itu mereka juga tidak mendapatkan pembelajaran tambahan atau pembelajaran individu. Sedangkan ABK dengan kategori *low vision* juga tidak terpenuhi kebutuhannya. Dalam pembelajaran ABK *low vision* tidak mendapatkan kaca pembesar, buku dengan huruf cetak besar dan juga media yang dapat diraba dengar dan juga diperbesar

PENUTUP

Simpulan

Pengelolaan kelas inklusif di SMA Negeri 1 Gedangan memiliki beberapa strategi yang dilakukan oleh guru PPKn guna menciptakan suasana kelas yang kondusif. Strategi tersebut dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan guru ketika mengelola kelas yaitu (1) penentuan tata tertib, strategi yang digunakan guru adalah dengan memperlakukan peserta didik secara adil dan menggunakan kontrak atau kesepakatan bersama dengan peserta didik, (2) pengaturan penempatan untuk berinteraksi, strategi yang digunakan guru adalah dengan membentuk kelompok di setiap proses pembelajaran dan mengacak peserta didik ketika membentuk kelompok, sehingga peserta didik bisa berinteraksi dengan peserta didik lainnya tanpa harus ada diskriminasi, (3) pengelolaan lingkungan belajar, strategi yang digunakan guru adalah dengan memberikan penguatan kepada peserta didik, menggunakan permainan ketika proses pembelajaran dan juga memberikan *reward*, (4) penyediaan media belajar, strategi yang dilakukan guru adalah dengan mengikuti perkembangan zaman atau teknologi dan juga menggunakan media pembelajaran yang adapat dipakai oleh siapa saja, baik peserta didik reguler maupun peserta didik berkebutuhan khusus, (5) pengaturan tempat duduk, strategi yang dilakukan guru adalah dengan mengatur tempat duduk peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, (6) mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik, strategi yang dilakukanguru ialah dengan menggunakan beberapa alternatif lain guna memenuhi kebutuhan peserta didik yang belum terpenuhi.

Saran

Dari hasil temuan yang diperoleh maka berikut saran peneliti kepada guru PPKn yaitu guru PPKn harusnya lebih ditingkatkan lagi dalam penyediaan media, karena media yang digunakan kurang variatif. Selain itu guru juga harus memberikan pengawasan yang lebih agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bisa terminimalisir. Sedangkan untuk sekolah, pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik harusnya lebih diperhatikan lagi, terlebih untuk fasilitas yang diberikan. Contohnya kaca pembesar, pembelajaran individual dan penambahan guru pendamping khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. 2009. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang memiliki kelaian dan memiliki potensi kecerdasn dan/atau bakat istimewa Jakarta.
- DPR-RI. 2003. *Salinan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional*.
- Garnida, Dadang. 2015. *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Hadis, Abdul. 2008. *Psikologi dalam Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Kustawan, Dedy. 2012. *Pendidikan Inklusif dan Upaya Implementasinya*. Bandung: Luxima Metro Media.
- Mudjito, Harizal, dan Elfindri. 2012. *Pendidikan Inklusif*. Jakarta : Baduose Media Jakarta.
- Rohani, Ahmad. 2004. *Pengelolaan Pengajaran*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sulistyadi, Hery Kurnia. 2014. "implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo". *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol. 2
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 1998. Psikologi Pendidikan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-empat tahun 2002.
- UNICEF. 1989. Konvensi Hak-Hak Anak. New York
- Yamin, Martinis. 2013. *Strategi dan Metode dalam model Pembelajaran*. Jakarta: GP PRESS GRUP.